

## ABSTRAK

Aturan prioritas usia pada sistem Kebijakan PPDB DKI Jakarta tahun 2020 menuai banyaknya respon pro dan kontra dari masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan dibalik timbulnya variasi respon masyarakat serta menguji pengaruh tingkat partisipasi masyarakat terhadap respon masyarakat dalam implementasi kebijakan PPDB DKI. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan melakukan analisis isi dari cuitan pengguna *twitter* di media sosial *twitter* selama bulan Juni – Agustus tahun 2020. Penelitian ini menunjukkan bahwa respon dari mayoritas pengguna *twitter* cenderung memiliki sentimen negatif terhadap kebijakan PPDB DKI Jakarta tahun 2020. Selain itu, Hasil temuan penelitian menunjukkan bahwa variasi respon masyarakat terhadap kebijakan PPDB DKI Jakarta tahun 2020 terjadi karena (1) masalah prioritas usia pada jalur zonasi PPDB DKI, (2) perbedaan penafsiran antara masyarakat dan pemerintah atas aturan prioritas usia jalur zonasi pada Permendikbud No. 44 Tahun 2019, dan (3) tidak adanya keterlibatan masyarakat dalam setiap proses kebijakan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam setiap proses kebijakan memiliki pengaruh terhadap respon masyarakat dalam implementasi kebijakan PPDB DKI Jakarta tahun 2020.

**Kata-kata Kunci:** Respon masyarakat; partisipasi publik; kebijakan; PPDB DKI; analisis isi; media sosial

## ***ABSTRACT***

*The age priority rule in the PPDB DKI Jakarta Policy system in 2020 has reaped many pros and cons from the community. This study aims to determine the reasons behind the variation in community responses and to examining the effect of the level of community participation on community responses in implementing the PPDB DKI policy. This research uses a qualitative descriptive method by analyzing the contents of the tweets of Twitter users on Twitter social media during the months of June - August 2020. This research shows that the responses of the majority of Twitter users tend to have negative sentiments towards the PPDB DKI Jakarta policy in 2020. The results of the research findings show that variations in the public response to the PPDB DKI Jakarta policy in 2020 occur due to (1) age priority problems in the PPDB DKI zoning route, (2) differences in interpretation between the community and the government on the age priority rules of the zoning route in Permendikbud No. 44 of 2019, and (3) there is no community involvement in any policy process. Therefore, it can be concluded that the level of public participation in each policy process has an influence on community responses in the implementation of the PPDB DKI Jakarta policy in 2020.*

**Keywords:** *Community response; public participation; policy; PPDB DKI; content analysis; social media*